

TESIS

**KEABSAHAN KONTRAK KONSTRUKSI PENUNJUKAN
LANGSUNG OLEH BUMN KEPADA ANAK
PERUSAHAANNYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA**

**(Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi
Konstruksi Di Lingkungan PT PLN (Persero))**

***THE VALIDITY OF DIRECT APPOINTMENT CONSTRUCTION
CONTRACTS BY STATE-OWNED ENTERPRISES TO THEIR
SUBSIDIARIES AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE JOB
CREATION LAW***

***(A Study on Conflicts of Interest in The Procurement of
Construction Consultancy Services Within PT PLN (Persero))***



**Oleh:
ASLIHATIN ZULIANA
NIM 2310622043**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**KEABSAHAN KONTRAK KONSTRUKSI PENUNJUKAN
LANGSUNG OLEH BUMN KEPADA ANAK
PERUSAHAANNYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA**

**(Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi
Konstruksi Di Lingkungan PT PLN (Persero))**

***THE VALIDITY OF DIRECT APPOINTMENT CONSTRUCTION
CONTRACTS BY STATE-OWNED ENTERPRISES TO THEIR
SUBSIDIARIES AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE JOB
CREATION LAW***

***(A Study on Conflicts of Interest in The Procurement of
Construction Consultancy Services Within PT PLN (Persero))***



**Oleh:
ASLIHATIN ZULIANA
NIM 2310622043**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

**KEABSAHAN KONTRAK KONSTRUKSI PENUNJUKAN
LANGSUNG OLEH BUMN KEPADA ANAK
PERUSAHAANNYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA
(Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi
Konstruksi Di Lingkungan PT PLN (Persero))**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi
Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ASLIHATIN ZULIANA

NIM 2310622043

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ASLIHATIN ZULIANA
NIM : 2310622043
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **"KEABSAHAN KONTRAK KONSTRUKSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH BUMN KEPADA ANAK PERUSAHAANNYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, (Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan PT PLN (Persero))"**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Aslihatin Zuliana
NIM. 2310622043

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aslihatin Zuliana

NIM : 2310622043

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEABSAHAN KONTRAK KONSTRUKSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH BUMN KEPADA ANAK PERUSAHAANNYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, (Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan PT PLN (Persero))”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Aslihatin Zuliana
NIM. 2310622043



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

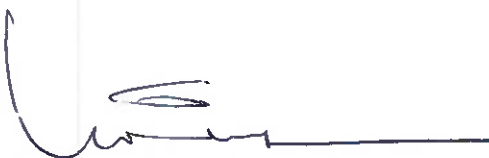
**KEABSAHAN KONTRAK KONSTRUKSI PENUNJUKAN LANGSUNG
OLEH BUMN KEPADA ANAK PERUSAHAANNYA PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Di Lingkungan PT PLN (Persero))**

**Disusun dan diajukan oleh:
ASLIHATIN ZULIANA
NIM. 2310622043**


Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 24 Oktober 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:


Pembimbing 1


Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N.M.Kn.
NIK. 218121385

Pembimbing 2


Dr. Suherman, S.H., LL.M
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister


Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Oktober 2025

ABSTRAK

ASLIHATIN ZULIANA (2310622043). *Keabsahan Kontrak Konstruksi Penunjukan Langsung Oleh BUMN Kepada Anak Perusahaannya Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Benturan Kepentingan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan PT PLN (Persero)).* Dibimbing oleh Iwan Erar Joesoef sebagai Pembimbing Utama dan Suherman sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formalitas hukum kontrak Jasa konstruksi melalui penunjukan langsung kepada perusahaan terafiliasi serta mengkaji keabsahan kontrak payung pra dan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus penelitian ini menjawab pertanyaan kritis mengenai mekanisme hukum formal yang mengatur perjanjian kesepakatan harga satuan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi jangka panjang dan amandemennya berdasarkan peraturan pengadaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif mengidentifikasi secara sistematis formalitas hukum dan keabsahan kontrak nomor 0217.PJ/DAN.01.02/B0104000/2020 terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber hukum primer lainnya termasuk ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kerangka tata kelola perusahaan, disamping bahan hukum sekunder dan komentar doktrinal. Analisis ini mengungkapkan bahwa penunjukan langsung sebelum Undang-Undang Cipta Kerja telah mematuhi keabsahan kontrak hukum perdata dan peraturan sektoral terkait Jasa Konstruksi. Ketentuan peralihan dan asas non-retroaktif mempertahankan keabsahan perjanjian Kesepakatan Harga Satuan melalui penunjukan langsung kepada perusahaan afiliasi. Sementara amandemen perjanjian yang bersifat non-substantif atau administratif tetap sah menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku, bukan hanya semata-mata untuk mempertahankan *continuity of contract* tetapi juga nilai utilitarianisme yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penunjukan langsung mencapai justifikasi hukum melalui mandat konstitusional dan hierarki legislatif, sekaligus memberikan manfaat utilitarian melalui peningkatan efisiensi pengadaan pada pekerjaan atau jasa dengan keahlian khusus. Temuan ini berkontribusi pada wacana ilmiah tentang tata kelola BUMN terkait bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berinteraksi dengan hukum kontrak dan tata kelola perusahaan, sekaligus menekankan pentingnya perlindungan konflik kepentingan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli dalam mencegah formalisme prosedural mengaburkan hasil untuk kepentingan umum yang substantif.

Kata kunci: Penunjukan langsung, Jasa Konstruksi, Afiliasi, Cipta Kerja, Monopoli

ABSTRACT

ASLIHATIN ZULIANA (2310622043). *The Validity of Construction Contracts for Direct Appointment by State-Owned Enterprises (SOEs) to Their Subsidiaries Post the Enactment of the Omnibus Law (A Study of Conflicts of Interest in the Procurement of Construction Consultancy Services within PT PLN (Persero)).* Supervised by Iwan Erar Joesoef as the Main Supervisor and Suherman as the Co-Supervisor.

This study aims to analyze the legal formalities of construction service contracts executed through direct appointment to affiliated companies and to examine the validity of umbrella contracts both prior to and following the enactment of the Omnibus Law. The focus of this research is to answer critical questions regarding the formal legal mechanisms governing unit price agreements for long-term construction consultancy services and their amendments, based on procurement regulations amended by the Job Creation Law. The study uses a normative juridical method, systematically identifying the legal formalities and the validity of Contract No. 0217.PJ/DAN.01.02/B0104000/2020, primarily based on Law No. 2 of 2017 on Construction Services, including its amendments and implementing regulations, as well as other primary legal sources, including statutory provisions, government regulations, and corporate governance frameworks, alongside secondary legal materials and doctrinal commentary.

This analysis reveals that the direct appointment before the enactment of the Job Creation Law complied with the validity requirements of civil law contracts and relevant sectoral regulations related to construction services. The transitional provisions and the principle of non-retroactivity uphold the validity of the unit price agreement executed through direct appointment to affiliated companies. Meanwhile, amendments to agreements that are non-substantive or administrative remain valid according to applicable civil law provisions, not only to maintain the continuity of the contract but also to preserve the utilitarian value embedded within it.

This study explains that the direct appointment mechanism achieves legal justification through constitutional mandates and legislative hierarchy, while also delivering utilitarian benefits through enhanced procurement efficiency for specialized services or work. These findings contribute to the academic discourse on SOE governance by explaining how the Job Creation Law interacts with contract law and corporate governance, while emphasizing the importance of strong conflict-of-interest protection under anti-monopoly law in preventing procedural formalism from obscuring substantive outcomes for the public interest.

Keywords: *Direct appointment, Construction services, Affiliation, Job Creation Law, Monopoly*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kajian Teoritis	26

B. Kerangka Berpikir atau Bagan Kerangka Berpikir	54
C. Defenisi Oerasional	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	59
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	59
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
D. Analisis Bahan Hukum	64
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Formalitas Hukum Penerbitan Kontrak KHS Jasa Konsultansi Konstruksi Jangka Panjang Melalui Penunjukan Langsung PT PLN (Persero) Kepada Anak Perusahaan Sebelum Dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	66
B. Analisa Keabsahan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Jangka Panjang Dengan Penunjukan Langsung dari BUMN Kepada Anak Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	124
BAB V PENUTUP	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA	177

DAFTAR TABEL

TABEL 1. ORISINALITAS PENELITIAN	16
---	-----------

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. KERANGKA BERPIKIR	55
---	-----------